GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 12 Februari 2007**
Subyek	**: Pendakalan Setu**	**Hari**	**: Senin**
		Halaman	**: 19**

38 Situ di Tangerang Mendangkal

[TANGERANG] Sebanyak 33 situ di Kabupaten Tangerang dan lima situ di Kota Tangerang mengalami pendangkalan. Padahal situ atau danau-danau kecil itu selain berfungsi sebagai daerah resapan air juga untuk menampung air di saat musin hujan. Pendangkalan ini diperkirakan juga menjadi penyebab banjir di beberapa kawasan Tangerang.

Salah satu situ yang mengalami pendangkalan yakni Situ Kelapa Dua, berlokasi tidak jauh dari pusat bisnis Lippo Karawaci. Penumpukan lumpur di badan situ sudah berlangsung jauh sebelum banjir besar menerjang Tangerang. Danau seluas 11 hektar itu banyak ditumbuhi eceng gondok dan tanaman gulma lainnya, sehingga terkesan tidak ada upaya pemeliharaan pihak terkait. Dampaknya, saat terjadi bencana banjir yang lalu, tanaman eceng gondok menyumbat pintu air situ yang menimbulkan luapan arus air dan menggenangi perumahan sekitar. Demikian pula dengan Situ Gede di Cikokol dan Situ Cipondoh di Cipondoh.

Pendangkalan tersebut diakui Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Cidurian, Joko Suryanto. "Hampir sebagian besar situ yang ada di Tangerang sudah dangkal," kata Joko di Tangerang, Sabtu(10/2).

Pendangkalan tersebut, ujarnya, tidak bisa dibiarkan bila berharap ke depan tidak ada lagi banjir. Sebab, adanya pendangkalan ter-sebut juga membuat luas situ berkurang.

Kini, paparnya, mulai disusun rencana mengeruk agar kedalaman situ-situ di Tangerang normal kembali. Namun lagi-lagi masalah anggaran menjadi kendalanya. Untuk memulihkan kembali kondisi situ-situ tersebut, lanjutnya, diper-lukan dana yang lumayan besar.

Dalam kaitan itu, pejabat berkompeten di Pemprov Banten berencana menggelar pertemuan dengan DPR, Senin (12/2) pagi. Masalah yang dibahas, kata Joko, soal alokasi da- na normalisasi situ yang mengalami pendangkalan. "Mudah-mudahan kebutuhan dananya bisa dimasukkan dalam APBN," harapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi, menegaskan, apapun bentuk kegiatan konstruksi, baik hunian maupun pabrik, di bantaran sungai harus dihentikan dan menjadikan daerah aliran sungai (DAS) sebagai kawasan terlarang bagi semua pembangunan fisik. Pemkab tidak boleh lagi mengeluarkan izin bagi pengembang yang melakukan kegiatan fisik di bibir sungai atau perairan umum lainnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, lanjut Arif, sudah menegaskan hal itu dalam rapat dengan para pimpinan DPRD se-Banten beberapa hari lalu. "Pengesahan ini terkandung konsekuensi serta sikap konsiten Pemda untuk secara disiplin mengamankan DAS," paparnya.

Selain itu, menurut dia, luasan hutan maupun kawasan hijau di setiap daerah minimal harus mencapai 30 persen dan setiap pengembang dikenakan kewajiban menyediakan daerah resapan di kawasan perumahan maupun industri yang dibangunnya. "Agar payung hukumnya jelas, ketentuan seperti itu diminta agar diperdakan," ujar Arif. [132]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup